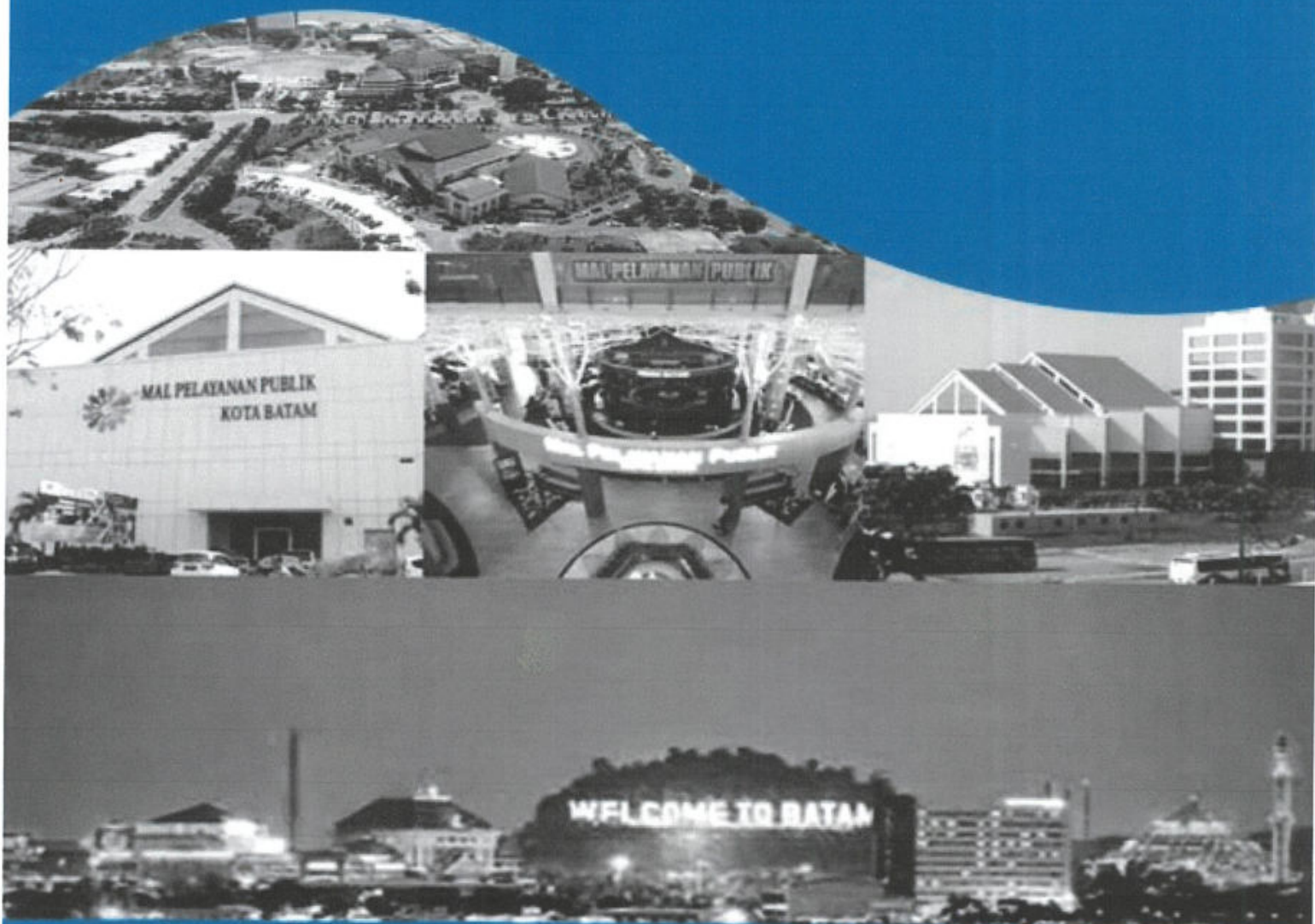




PEMERINTAH KOTA BATAM

RENJA **TAHUN 2023**



DPMPTSP

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

GEDUNG SUMATRA CONVENTION CENTER LT 1
& 2 MALL PELAYANAN PUBLIK KOTA BATAM



Email: dpmptspbatam@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam TA. 2023 dapat disusun sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DPMPTSP Kota Batam Tahun 2023 disusun mengacu dan konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota Batam periode 2021-2026. Tatkala penting yang menjadi fokus penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, 22 Juli 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM



FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19680412 198909 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
I.1 Latar Belakang.....	5
I.1.1 Pengertian Renja PD.....	5
I.1.2 Proses Penyusunan Renja PD	5
I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
I.2 Landasan Hukum.....	8
I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD	8
I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran	8
I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait (nama PD).....	9
I.3 Maksud dan Tujuan	10
I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD	10
I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD	10
I.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	29
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	29
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	29
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	30
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	42

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	42
3.3. Program dan Kegiatan	44
3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan	44
3.1.2. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.....	48
3.1.3. Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33	51
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	64
BAB V. PENUTUP.....	71
5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan.....	71
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	71
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	72

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renja PD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu 5 (lima) sebagaimana tertuang di dokumen perencanaan Rencana Strategis. Renja DPMPTSP Kota Batam bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja disusun sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

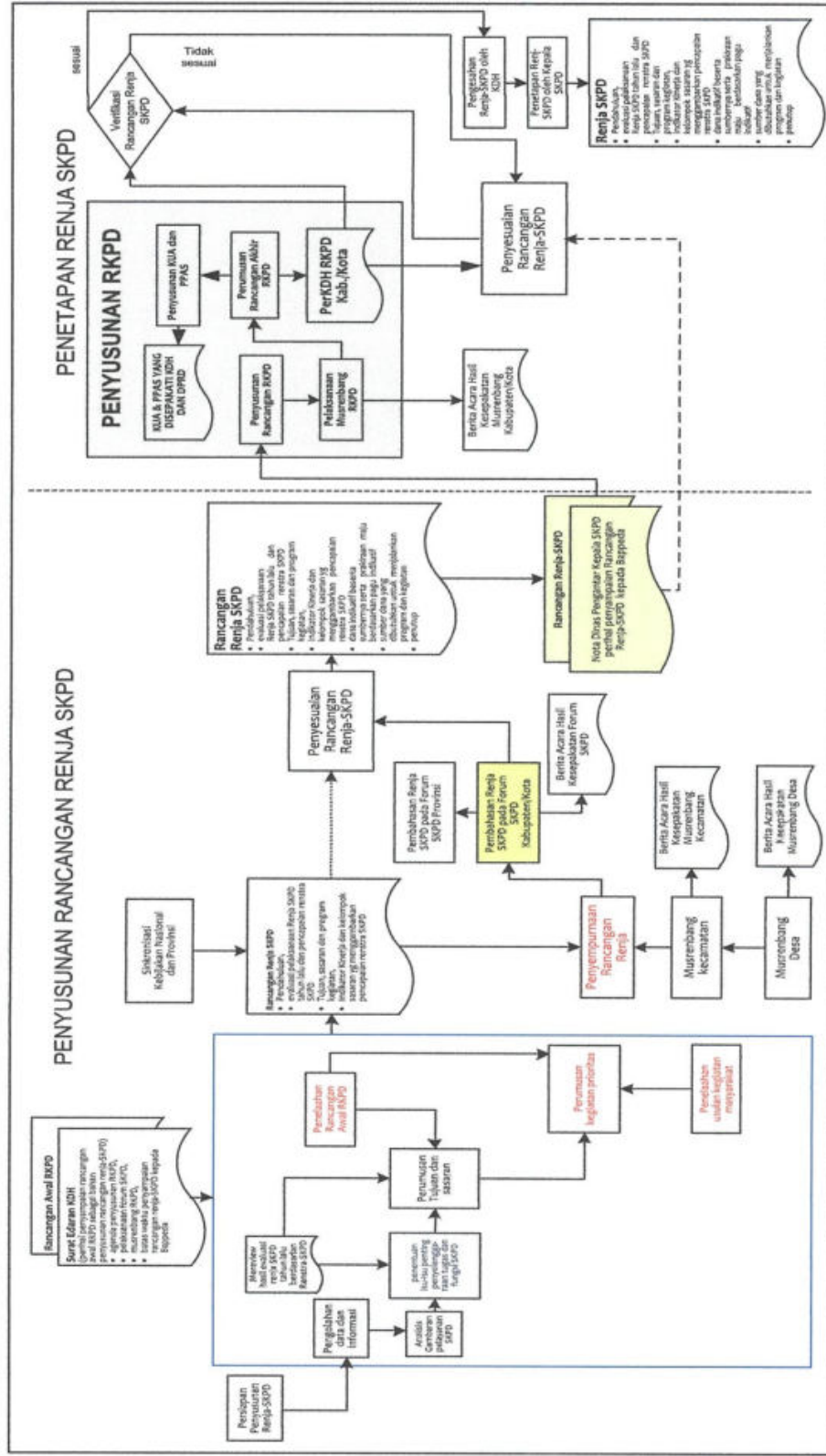
I.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

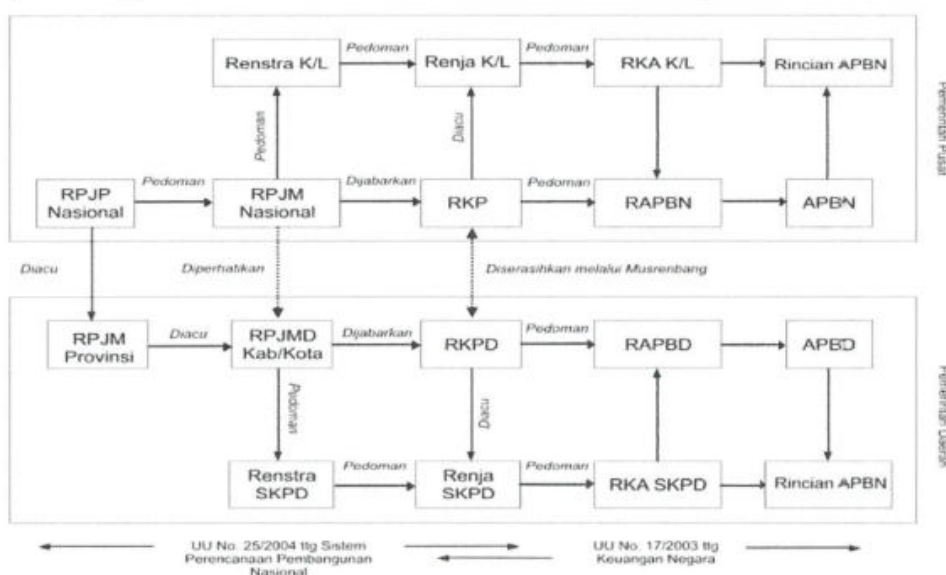
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1.1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batam Periode 2021 - 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Kepulauan Riau/ Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



Gambar I.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen lainnya

I.2 Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- Peraturan Walikota Batam Nomor 74 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya terkait (nama PD)

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud Penyusunan Renja PD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023, dan memberikan gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan Kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tahun 2023.

I.3.2. Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) Tahun 2023.

I.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

RENCANA KERJA PERUBAHAN DPMPSTP TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

I.2.Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja dan Kewenangan Perangkat Daerah, ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, dan ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya.

I.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang susunan garis besar isi dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021 – 2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NPSK, maupun terhadap IKK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan tingkat kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan, peluang dan tantangan, serta isu-isu penting/strategis pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini berisikan tentang penjelasan singkat mengenai rancangan awal RKPD 2023 dan tampilan tabel rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan RKPD 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menyajikan tentang penjelasan singkat mengenai usulan program dan kegiatan masyarakat jika ada.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan ranwal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, serta tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tabel Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Batam Tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan sesuai kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Di tahun 2022 DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 6 (enam) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp15.830.448.903.

Di Tahun 2022 DPMPTSP Kota Batam menyusun anggaran untuk mencapai 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1) Meningkatnya realisasi investasi, dengan target indikator kinerja **Jumlah Realisasi Investasi (Rp3 T)** dan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, dengan target indikator kinerja **Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat (5%)**. Pada triwulan II Tahun 2022, anggaran pada sasaran 1 dialokasikan sebesar Rp804.391.000 sedangkan anggaran pada sasaran 2 dialokasikan sebesar Rp15.026.057.903.

Evaluasi yang dilakukan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 DPMPTSP Kota Batam terdiri dari 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp15.830.448.903 (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah) merupakan bahan analisis terhadap usulan rencana perubahan rencana kerja di tahun ini. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Batam.

Selanjutnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 DPMPTSP Kota Batam dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp14.918.074.903 melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp8.499.001.143, outcome kinerja yakni: Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome*

kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (2 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 2 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp683.555.350, *outcome* kinerja kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (6 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 6 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp141.940.000, *outcome* kegiatan yakni: Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (1 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 1 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp5.284.638.410 memiliki *outcome* yaitu: Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp308.940.000, *outcome* kinerja yakni: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi dengan target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp111.000.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Rp111.000.000, outcome kegiatan ini yakni: Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman Modal yang Dipenuhi dengan target kinerja (5%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah dokumen yang disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun);
- III. Program Promosi Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp309.477.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp309.477.000, outcome kegiatan ini yakni: Persentase Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan).
- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp21.483.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp21.483.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan, Konsultasi, dan Pengaduan dengan target kinerja (90%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah izin terbit sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit).
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan anggaran sebesar Rp383.914.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp383.914.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Tingkat Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM dengan target kinerja (10%), dimana rumus penghitungan *outcome* kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah

ditetapkan (jumlah realisasi LKPM dibagi dengan jumlah target).

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp86.500.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp86.500.000, *outcome* kegiatan ini yakni: Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan (4 kali).

Uraian anggaran DPMPTSP Kota Batam di atas merupakan gambaran secara umum, bahwa terdapat perubahan indikator kinerja pada seluruh sub kegiatan disesuaikan berdasarkan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga perlu disusun perubahan perencanaan, target dan satuan target. Selain itu secara substansi **output sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor** semula 24 laporan menjadi 12 laporan dan pengalihan anggaran ke sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dimana anggaran sewa gedung dialihkan menjadi anggaran pemeliharaan, hal ini disebabkan status pengelola gedung Sumatera Promotion Center (SPC) telah diambil alih oleh Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dari PT. Sembilan Satu Satu. Dengan dikelolanya gedung SPC oleh pihak pemerintah maka DPMPTSP Kota Batam tidak lagi menganggarkan biaya sewa gedung akan tetapi menganggarkan biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas gedung yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Batam.

Anggaran sewa gedung di sub kegiatan tersebut berada dalam **kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** dan **kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**.

Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Batam

Kode	2	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kegiatan urusan yang terpenuhi	100%				100%	100%	100.00	
2	01	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%			100%	100%	100.00	
2	01	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 OB		532 OB	532 OB	100.00	

2	18	01	2	02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokumen	324 Dokumen	324 Dokumen	100.00
2	18	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum PD	90%	90%	100.00	
2	18	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.00	
2	18	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket	3 Paket	100.00	
2	18	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	720 Paket	3 Paket	480.83	
2	18	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	7 Jenis	140.00	

2	18	01	2	06	06	Sub Kegiatan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00
2	18	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	94 Kali	72 Kali	76.60	
2	18	01	2	07	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	100.00	
2	18	01	2	07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	93 Jenis	17 Jenis	18.28	
2	18	01	2	08	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan PD yang terpenuhi	100%	100%	100.00	
2	18	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	36 Jenis	24 Jenis	66.67	

2	18	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis								24 Jenis	100.00
2	18	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/kelompok)	416 Orang Bulan								416 Orang Bulan	100.00
2	18	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%								100.00	100.00
2	18	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan	6 Unit								6 Unit	100.00
2	18	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	84 Unit								93 Unit	110.71

2	18	01	2	09	09	Sub Kegiatan Penyediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100.00
2	18	02	2	09	09	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang dilaksanakan	3 Kegiatan					1 Kegiatan	2 Kegiatan	66.67
2	18	02	2	02	02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi (jumlah dokumen yg disusun/jml dokumen yg seharusnya disusun)	100%					30%	38%	38.00
2	18	02	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	5 Dokumen Kajian					1 Dokumen Kajian	2 Dokumen Kajian	40.00
2	18	03	2	09	09	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase tingkat minat investasi	95%					95%	48%	97.89
2	18	03	2	01	01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal	Persentase kegiatan promosi yang dilaksanakan	78%					64%	64%	82.05

2	18	03	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
2	18	03	2	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.50
2	18	04	2	04	2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	99%	90%	84%	84.85
2	18	04	2	01	01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Ketepatan waktu responsif berjalannya proses perizinan konsultasi dan pengaduan	95%	90%	90%	94.74
2	18	04	2	01	01	Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	55.56

2	18	05	2	01	2	05	2	01	60%	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	10%	30%	50.00
2	18	05	2	01					60%	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	10%	20%	33.33
2	18	05	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			3000 Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	16.67
2	18	05	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			1200 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman modal	200 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	50.00
2	18	05	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			1200 Izin / SIUP	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	120 Izin/SIUP	1200 Izin/SIUP	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebaga berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Realisasi Investasi

Indikator Kinerja Utama

I. Realisasi Investasi

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan 2022

Target realisasi investasi di tahun 2021 adalah Rp3.000.000.000.000 capaian realisasi sebesar Rp14.880.795.418.685 atau sebesar 496.03% melebihi target. Untuk target realisasi investasi di tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000.000 dengan capaian realisasi sebesar 3.860.616.400.000 atau sebesar 128.69%. Jika dibandingan capaian realisasi investasi antara tahun 2021 dan 2022 maka ada penurunan capaian, akan tetapi pencapaian realisasi investasi di Renja tahun 2022 tetap melebihi target. Peningkatan realisasi investasi yang sangat besar dan signifikan ini dikarenakan adanya penghitungan realisasi investasi tidak hanya menghitung realisasi investasi PMDN saja, namun juga menghitung realisasi investasi PMA yang merupakan bagian dari keseluruhan investasi di daerah. Cara penghitungan realisasi investasi ini dilakukan untuk mengetahui keseluruhan realisasi investasi yang ada di daerah dan dapat dipakai sebagai tolok ukur kemajuan maupun kemunduran perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja serta berkurangnya jumlah angka pengangguran di daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Indikator Kinerja Utama

I. Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan

Target jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan di tahun 2022 sebanyak 2.600 Izin dengan capaian realisasi sebanyak 4.186 Izin.

II. Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP

Target persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP di tahun 2022 ditetapkan 90% dari izin yang terbit sesuai waktu SOP, capaian realisasi hanya mencapai 95%.

Tabel T-C.30

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Realisasi Investasi		Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kota	Rp3 T	Rp3 T	Rp3 T	Rp4 T	Rp14,880,795,418,685	Rp 3,860,616,400,000	Rp3 T	Rp4 T	
2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan			2100 Izin	2600 Izin	100%	100%	4951 Izin	4186 Izin	100%	100%	
3	Persentase Waktu Penyelesaian Perizinan Sesuai SOP			99%	90%	90%	90%	90.64%	95%	90%	90%	Sampai dengan Triwulan II 2022
4	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			100%	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100%	100%	100%	100%	
5	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100% Per Tahun	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2022 yang masuk kategori “Sangat Berhasil” yakni realisasi capaian melebihi target yang ditetapkan adalah:

- a. Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di tahun 2022 mencapai Rp3.860.616.400.000 atau melebihi target sebesar 128.69%.
- b. Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan, di tahun 2022 mencapai 4.186 Izin atau melebihi target sebesar 161%.
- c. Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perizinan Sesuai Waktu SOP, di tahun 2022 mencapai 95% dari target yang ditetapkan 90% izin yang diterbitkan sesuai waktu SOP.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2022 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

- a. Kondisi pandemik virus corona Covid 19 di Indonesia mulai merebak maret 2020, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan kegiatan pengendalian penanama modal secara tatap muka;
- b. Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/pelaku usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- c. Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
- d. Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
- e. Dalam proses pengaktifan izin dengan komitmen masih ada yang dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang panjang;

- f. Adanya ketidaksesuaian data scan yang diinput oleh pemohon, sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;
- g. Pelimpahan izin belum dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi dan belum dilakukan penyesuaian tupoksi DPMPTSP Kota Batam;
- h. Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin terbit tepat waktu.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor internal tersebut dapat berupa kekuatan (*strenghts*) dan berupa kelemahan (*weaknesses*).

1. Kekuatan (*Strengths*)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan faktor kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kota Batam adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;
- b. Bangunan gedung yang cukup memadai;
- c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal;

- d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal;
- e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masih rendah;
- b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal dan sub urusan PTSP;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan dalam mendukung kinerja pelayanan publik;
- d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang (*Opportunities*) dan ada yang berupa ancaman (*Threats*). Faktor eksternal yang menjadi peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor peluang (*opportunities*) DPMPSTP Kota Batam adalah :

- a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara professional;

- b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi OSS RBA (*Risk Based Approach*);
- c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam semakin tinggi;
- d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;
- e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi investor yang menanam modalnya di zona KEK;
- f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap tenaga kerja;
- g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan tepat sasaran;
- h. Tersedianya tempat dan *event* pameran skala nasional dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (*threats*) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai berikut:

- a. Regulasi yang terus mengalami perubahan yang berdampak pada pelaksanaannya di lapangan;
- b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik;
- c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya;

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua belas) Kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari

Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas;

3. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM);
4. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (*Risk Based Approach*);
6. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha;
7. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
8. Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
9. Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi, Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;
10. Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di Renja tahun 2023;
2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan lemari arsip;
3. Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

4. Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja adalah perencanaan tahunan Dinas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Agar tujuan dan sasaran Dinas tercapai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, dibutuhkan pemahaman dan kesungguhan pengelola anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga dapat segera dilakukan koreksi, jika terdapat penyimpangan arah pelaksanaan.

1. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan. Dalam rancangan awal RKPD 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengusulkan 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp21.560.147.968, namun dengan adanya perubahan pada penjabaran III dan penjabaran IV terkait adanya Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 906/923/Keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah B2LPS, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan FPM dan Dana Insentif Daerah, maka ada perubahan pada sub kegiatan yaitu pengurangan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; pengurangan sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non

Perizinan pada program Pelayanan Penanaman Modal; penambahan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tidak mengubah anggaran, hal ini dikarenakan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM).

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

RANCANGAN AWAL RKPD											
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 Batam	4 1. Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	5 5%	6 368.495.000	7 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8 Batam	9 Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti	10 5%	11 368.495.000	12
	1.1. Kegiatan Penetapan Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1.1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	8%	168.496.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif	8%	168.496.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		6.2.1. Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kajian	168.496.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kajian	168.496.000	
1.2.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1.2. Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	8%	199.999.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	8%	199.999.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1.2.1. Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	2 Kajian	199.999.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota	2 Kajian	199.999.000	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	2. Persentase Kepeminatan Investasi	90%	412.011.000	Program Promosi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kepeminatan Investasi	90%	412.011.000	
2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		2.1. Jumlah pengunjung media informasi promosi investasi	208.152 Orang	412.011.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pengunjung media informasi promosi investasi	208.152 Orang	412.011.000	
			2.2. Jumlah pengunjung pameran penanaman modal	200 Orang				Jumlah pengunjung pameran penanaman modal	200 Orang		
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		2.1.1. Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	148.389.000	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	148.389.000	
2.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		2.1.2. Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 Kali	263.622.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 Kali	263.622.000	

RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	3.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	3. Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP	90%	53.830.000	Program Pelayanan Penanaman Modal	Batam	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai waktu SOP	90%	53.830.000	
3.1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		3.1. Tingkat Ketepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan	90%	53.830.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Ketepatan Waktu responsif berjalanya proses perizinan, konsultasi dan pengaduan	90%	53.830.000	
3.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		6.2.1. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3000 Pelaku Usaha	5.770.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3000 Pelaku Usaha	5.770.000	
3.1.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		6.2.2. Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	50 Orang	48.060.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	50 Orang	48.060.000	
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda	Batam	4. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	447.996.880	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Batam	Tingkat Kepatuhan Perusahaan Dalam Menyampaikan LKPM	10%	447.996.880	
4.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		4.1. Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	447.996.880	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	10%	447.996.880	
4.1.1.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.1. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	30 Kegiatan Usaha	13.710.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan	4 Laporan	13.710.000	
4.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		4.1.2. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	200 Orang	399.006.880	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki izin industri dan SIUP yang diawasi	200 Pelaku Usaha	399.006.880	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	4.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	3	4.1.3. Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanaman modal	30 Izin/ SIUP	35.280.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	8	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh pembinaan pelaksanaan penanaman modal	10 Izin/ SIUP	35.280.000	Sesuai juknis DAK
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	5. Persentase Kesiapan Data Investasi Secara Realtime	70%	89.500.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Batam	Persentase Kesiapan Data Investasi Secara Realtime	70%	89.500.000	
5.1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5.1. Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang disajikan; Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	89.500.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Batam	Frekuensi Pembaruan Data Investasi yang disajikan; Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Perizinan yang dilaksanakan	4 Kali	89.500.000	
5.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		5.1.1. Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	5000 Izin	89.500.000	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Batam	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	4.500 Izin	89.500.000	
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	6. Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.857.492.690	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.857.492.690	
6.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.1. Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100%	9.345.964.370	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi	100%	9.345.964.370	
6.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan ASN Tunjangan		6.2.1. Jumlah orang yang digaji dan diberi tunjangan ASN	532 OB	9.288.704.370	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan ASN Tunjangan		Jumlah orang yang digaji dan diberi tunjangan ASN	532 OB	9.288.704.370	
6.1.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		6.2.2. Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	324 Dokumen	57.260.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	324 Dokumen	57.260.000	
6.2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.2. Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	152.204.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	152.204.000	

No.	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		6.2.1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104 Stel	73.460.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	104 Stel	73.460.000	
6.2.2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		6.2.2. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 ASN	78.744.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 ASN	78.744.000	
6.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	6.3 Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	720.164.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	720.164.000	
6.3.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.3.1. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	3.910.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	3.910.000	
6.3.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.3.2. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	150.529.500	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Jenis	150.529.500	
6.3.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik		6.3.3. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	36.740.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	36.740.000	
6.3.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.3.4. Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	74.794.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	74.794.500	
6.3.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6.3.5. Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000	
6.3.6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6.3.6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	94 Laporan	452.390.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	94 Laporan	452.390.000	
6.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	6.4 Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	188.753.800	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	100%	188.753.800	
6.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6.4.1. Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	0	
6.4.2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		6.4.2. Jumlah paket mebel yang disesuaikan	2 Paket	25.200.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disesuaikan	2 Jenis	25.200.000	
6.4.3.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.4.3. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 Jenis	163.553.800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	14 Unit	163.553.800	

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pegu Indikatorif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	6.5 Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.399.898.720	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.399.898.720	
6.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.4.2. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	312.000	Sub Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	312.000	
6.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	6.4.3. Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan	964.278.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Jenis	964.278.000	
6.5.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.4.4. Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	36.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Jenis	36.000.000	
6.5.4.	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6.4.5. Jumlah sasaran pelaksanaan pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/kelompok)	12 Laporan	1.399.308.720	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah sasaran pelaksanaan pelayanan umum kantor yang difasilitasi (orang/kelompok)	416 OB	1.399.308.720	
6.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	6.6. Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.050.507.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	100%	1.050.507.800	
6.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		1.6.1 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	218.230.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	218.230.000	
6.6.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.6.2 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	84 Unit	40.010.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	84 Unit	40.010.000	
6.6.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.6.3 Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	792.267.800	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	792.267.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 dan RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam berperan aktif agar pembangunan daerah Kota Batam dapat mencapai target tujuan RPJMD Kota Batam dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Batam.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Akhir (Ranhir) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani yang Modern dan Sejahtera” yang dijabarkan kedalam 5 (lima) dan DPMPTSP Kota Batam melaksanakan Misi 1 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Batam dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator kinerja yaitu **Meningkatnya Investasi.**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu “Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah” dan “Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang pelayanan Satu Atap” melalui tujuan yaitu :

- Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam dan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Perizinan

Tabel. 3.2.1

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam dan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10%
2		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dibidang pelayanan perizinan satu atap	IKM A

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah “Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan” melalui :

- a. Realisasi Investasi;
- b. Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat.

Tabel. 3.2.2

Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realiasi Investasi	Rp3.000.000.000.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat	5%

Tabel. 3.2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam	Pertumbuhan realisasi investasi daerah	10%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM A

3.3. Program dan Kegiatan

3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi kepala daerah Kota Batam tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”. Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada DPMPSTP adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2.4
Penjabaran Pelaksanaan pada DPMPSTP

Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	
1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing	1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	
5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah.

Berikut kegiatan prioritas untuk DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan program pembangunan daerah:

Tabel. 3.2.5
Kegiatan Prioritas DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih

Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan
Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	I. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.	Program Promosi Penanaman Modal
	II. Meningkatkan dan memperkuat kinerja pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal

	perizinan melalui penguatan SDM dan Teknologi Informasi.	
	III. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	IV. Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal.	Program Promosi Penanaman Modal

2. Pencapaian SDGs

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Deveiopment Goals* (TPB/SDGs), maka Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung menetapkan arah kebijakan yang secara konkrit dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan. Pencapaian TPB/SDG's langsung diterapkan pada sejumlah program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pilar TPB/SDGs.

Adapun program prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDG's) adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.2.6
Tujuan DPMPTSP sesuai dengan TPB/SDG

Tujuan	Program Pembangunan dalam RPJMD
Pilar Pembangunan Ekonomi	
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Pencapaian Program Skala Prioritas Nasional

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan target yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan yang akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 5/2021, PP Nomor 6/2021 dan PP Nomor 9/2021, dimana PTSP sedang didorong untuk memberikan layanan perizinan yang cepat, tepat dan mudah bagi pelaku usaha dan memberikan kepastian dalam pemberian layanan, sehingga tercipta iklim investasi yang melayani dan meningkatkan realisasi investasi di daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Implementasi penggunaan aplikasi OSS RBA segera dioptimalkan dalam proses permohonan perizinan dan penanaman modal di daerah.

4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Untuk memperkenalkan potensi investasi di Kota Batam di semua sector perlu adanya promosi yang dilakukan baik keikutsertaan dalam pameran dan sejenisnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Program yang mendukung antara lain adalah

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal. Diharapkan dengan pelaksanaan promosi secara optimal melalui berbagai media yang ada maka akan dapat meningkatkan nilai investasi di Kota Batam.

5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam sebesar 10%, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan pencapaian nilai IKM A. Untuk mencapai target ini perlu dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung peningkatan realisasi investasi disetiap tahunnya yaitu dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian Penanaman Modal, sedangkan untuk mencapai nilai IKM A dibidang pelayanan perizinan maka dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

3.1.2. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk mencapai visi misi diatas maka, Renja DPMPSTP Tahun 2023 terdapat 5 program wajib dan 1 program penunjang, 6 kegiatan wajib dan 6 kegiatan penunjang serta 10 sub kegiatan wajib dan 19 sub kegiatan penunjang, sehingga total 29 sub kegiatan.

Tabel. 3.1.2.

Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		
No	Sasaran Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Su Kegiatan
1	Meningkatnya realisasi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
		Program Promosi Penanaman Modal
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang perizinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Menurut Sumber Pendanaannya, program pada DPMPTSP bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang bersumber dari DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Pagu Indikatif Rp13.857.492.690.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Pagu Indikatif Rp368.495.000.
- Program Promosi Penanaman Modal; Pagu Indikatif Rp412.011.000
- Program Pelayanan Penanaman Modal; Pagu Indikatif Rp53.830.000.
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Pagu Indikatif Rp89.500.000

Program diatas menggunakan sumber dana Pendapatan Asli Daerah, jumlah Pagu Indikatif Rp14.781.328.690

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menggunakan sumber dana DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal, pagu indikatif Rp447.996.880.

3.1.3. Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada tabel T-C.33

Tabel T-C.33.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kota Batam

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

lembar 1 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2									
2 18 01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								16.353.919.748
2 18 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Batam	100%	13.857.492.690			100%	14.777.423.748
	PROGRAM PENUNJANG	Persentase terpenuhinya							
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	penunjang urusan pemerintahan daerah							
2 18 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	9.345.964.370			100%	9.804.211.148
2 18 01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		532 OB	9.288.704.370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	532 OB	9.712.981.148

lembar 2 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		324 Kegiatan	57.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		324 Kegiatan	91.230.000
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	152.204.000			100%	153.460.000
2 18 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		104 Stel	73.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		104 Stel	73.460.000
2 18 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 ASN	78.744.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 ASN	80.000.000
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	720.164.000			100%	758.057.000

lembar 3 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2 Jenis	3.910.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	3.910.000
2 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		32 Jenis	150.529.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32 Jenis	142.323.500
2 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		700 Jenis	36.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700 Jenis	36.420.000
2 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		7 Jenis	74.794.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Jenis	74.794.500
2 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 Jenis	1.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Jenis	1.800.000

lembar 4 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		94 Kali	452.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		94 Kali	498.809.000
2 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	188.753.800			100%	300.000.000
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan		2 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	0
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		2 Jenis	25.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis	0
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		14 Jenis	165.553.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14 Jenis	300.000.000

lembar 5 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi		100%	2.399.898.720			100%	2.618.465.600
2 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 Jenis	312.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Jenis	432.000
2 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Jenis	964.278.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Jenis	1.005.033.600
2 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24 Jenis	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Jenis	0
2 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		416 OB	1.339.308.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		416 OB	1.613.000.000

lembar 6 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.050.507.800				1.143.230.000
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	218.230.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Unit	218.230.000
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		84 Unit	40.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84 Unit	65.000.000
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	792.267.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	860.000.000
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin investasi yang ditindaklanjuti		5%	368.495.000			5%	368.496.000

lembar 7 dari 12

Kode	(1)	(2)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 02 2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang memperoleh insentif		8%	168.496.000			8%	168.496.000
2 18 02 2.01 02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah		1 Kejian	168.496.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Kajian	168.496.000
2 18 02 2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi		8%	199.999.000			8%	200.000.000
2 18 02 2.02 02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		2 Kajian	199.999.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Kajian	200.000.000
2 18 03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase kcpeminatan investasi		90%	412.011.000			90%	400.000.000

lembar 8 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung media informasi promosi investasi Jumlah pengunjung pameran penanaman modal		208152 Orang 200 Orang	412.011.000			208152 Orang 200 Orang	400.000.000
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	148.389.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	150.000.000
2 18 03 2.01 02	Felaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		3 Kali	263.622.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Kali	250.000.000
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP		90%	53.830.000			90%	373.000.000

lembar 9 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat ketepatan waktu berjalannya perizinan, konsultasi, dan pengaduan		90%	53.830.000			90%	373.000.000
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		3000 Pelaku Usaha 90%	5.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3000 Pelaku Usaha 90%	23.000.000

lembar 10 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Terhadap Masyarakat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan		50 Layanan 240 Orang	48.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Layanan 240 Orang	350.000.000
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM		10%	447.996.880			10%	342.000.000

lembar 11 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu		10%	447.996.880			10%	342.000.000
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		4 Laporan	13.710.000	DAK Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		4 Laporan	130.000.000
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman modal		200 Orang	399.006.880	DAK Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		200 Orang	82.000.000
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		1200 Izin/SIUP	35.280.000	DAK Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		1200 Izin/SIUP	130.000.000

lembar 12 dari 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime		70%	89.500.000		70%	93.000.000
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembaruan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan		4 Kali	89.500.000		4 Kali	93.000.000
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan		4500 Izin	89.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4500 Izin	93.000.000

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan PD dapat dilihat pada tabel berikut:

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Kelelasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penasungjawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Daerah	Target	Pagu Indikatif
2															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					15,229,325,270					16,353,919,748				
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		100 %	18,857,492,690					14,777,423,748				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	%		%	9,345,964,370					9,004,211,148	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18.01.2.02.01	Jumlah Orang yang memerika gaji dan Tunjangan ASN		532.08		9,288,704,370			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	532.08	9,212,981,148	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		324 Kegiatan		57,260,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		324 Kegiatan	91,230,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	%		%	132,204,000						133,460,000			
2	18.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas berupa Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket 104 Set		73,460,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Paket 104 Set	73,460,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 ASN		78,744,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 ASN	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD yang terpenuhi	%		%	720,164,000						756,057,000			
2	18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Jenis 0 Paket		3,910,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Jenis 0 Paket	3,910,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktoran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kategori Sasaran	Praktoran Maju Rencana Tahun 2024		Peringkat Daerah Panggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Naional	Proritas	
2.18.01.2.06.02	Persediaan Peralatan dan Peningkatan Kinerja yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kinerja yang disediakan	32 Jenis			32 Jenis	150,529,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32 Jenis	142,223,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	700 Jenis 2 Paket			700 Jenis 2 Paket	36,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			700 Jenis 2 Paket	36,420,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.05	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis 0 Paket			7 Jenis 0 Paket	74,794,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Jenis 0 Paket	74,794,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.06	Persediaan Bahan Binaan dan Peralatan Penggandaan	Jumlah Dokumen bahan binaan dan peralatan penggandaan yang disediakan	12 Jenis			12 Jenis	1,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Jenis	1,800,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 Kali			94 Kali	452,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			94 Kali	488,809,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase administratif keuangan PD yang terpenuhi	%		%	100 %	188,753,800				100 %	300,000,000	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Jenis			2 Jenis	25,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	14 Jenis 0 Unit			14 Jenis 0 Unit	163,553,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14 Jenis 0 Unit	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase administratif keuangan PD yang terpenuhi	%		%	100 %	2,395,898,720				100 %	2,618,455,600	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023**

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Pemanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2.18.01.2.08.01	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan persediaan jasa surat menyurat	12 Jenis			312.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Jenis	432.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.08.02	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan persediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Jenis			964.278.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			36 Jenis	1.003.033.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.08.03	Persediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan persediaan jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	24 Jenis			36.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24 Jenis	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.08.04	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan persediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	416 OB			1.399.308.720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			416 OB	1.613.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.050.507.800						1.143.230.000			
2.18.01.2.09.02	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	6 Unit			218.230.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 Unit	218.230.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah perakitan dan mesin lainnya yang dipelihara	84 Unit			40.010.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84 Unit	65.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki/ direhabilitasi	1 Unit			792.267.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	860.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENANAMAN MODAL	Penelitian dan Investasi yang dibiayakannya	%			368.496.000					5 %	368.496.000			
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menajadi Kewaspadan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Perilaku usaha yang memperoleh Insentif	%			168.496.000					8 %	168.496.000			

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target BKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dan Pelaku Usaha Yang Mempunyai Insentif dan Kemudahan Bisnis di Daerah	1 Kajian		168,496,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	1 Kajian	168,496,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal yang dipenuhi	%	%	199,999,000				8 %	200,000,000					
2.18.02.2.02.03	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2 Kajian 0 Dokumen		199,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	2 Kajian 0 Dokumen	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kepariphatan investasi	%	%	412,011,000				90 %	400,000,000					
2.18.03.2.01	Pengembangan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujung media informasi promosi investasi Jumlah Pengujung Pameran Penanaman Modal	Orang Orang	Orang Orang	412,011,000				208152 Orang 200 Orang	400,000,000					
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Perabaran Daerah Yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Keunggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		148,389,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Kali		263,622,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	3 Kali	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Petyeitan perizinan sesuai waktu SQP	%	%	51,830,000				90 %	373,000,000					
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan waktu responsif berjalannya proses perizinan, konsultasi dan pengabdian	%	%	51,830,000				90 %	373,000,000					

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Capaian RKPD Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Problema Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Kategori Sasaran	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Target		Pagu Insentif
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Pelaku Usaha 3000 Pelaku Usaha 50 Persen			5.770.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	0 Pelaku Usaha 3000 Pelaku Usaha 90 Persen	23.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengalihan Penguasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mengunjungi Layanan Konsultasi dan Terkirimnya Penguasaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Layanan 240 Orang			48.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	04. Peningkatan dan Fasilitas Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	50 Layanan 240 Orang	350.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepuasan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	%			447.996.880					10 %	342.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM tepat waktu	%			417.996.880					10 %	342.000.000	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Laporan			13.710.000		DAK Non-Fisk-Fasilitas Penanaman Modal			4 Laporan	130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tahun 2023**

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RP/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pencanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Nasional	Daerah			
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan pembinaan pelaksanaan Penanaman modal				200 Orang	399,006,880		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	04. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Mandiri dan Keunggulan Wilayah	200 Orang	82,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				1200 Izin/ SIUP	35,280,000		DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal		1200 Izin/ SIUP	130,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penyerasa ketersediaan data modast secara realtime	%			70 %	85,500,000				70 %	93,000,000		
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembakuan data investasi yang disajikan; evaluasi pengembangan sistem informasi perizinan yang dilaksanakan	Kali			4 kali	85,500,000				4 kali	93,000,000		
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan				4500 Izin	89,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4500 Izin	93,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
TOTAL							15,229,325,570					16,353,919,748		

BAB V. PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2023 mengusulkan 6 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp15.229.325.570. Pada Rancangan Akhir Renja DPMPTSP 2023 ada catatan penting yaitu *output* Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor semula 24 laporan menjadi 12 laporan output sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor semula 24 laporan menjadi 12 laporan dan pengalihan anggaran ke sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dimana anggaran sewa gedung dialihkan menjadi anggaran pemeliharaan.

Hal ini disebabkan status pengelola gedung Sumatera Promotion Center (SPC) telah diambil alih oleh Badan Pengusahaan dan Pengembangan (BPP) yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dari PT. Sembilan Satu Satu. Dengan dikelolanya gedung SPC oleh pihak pemerintah maka DPMPTSP Kota Batam tidak lagi menganggarkan biaya sewa gedung akan tetapi menganggarkan biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas gedung yang digunakan oleh DPMPTSP Kota Batam. Anggaran sewa gedung di sub kegiatan tersebut berada dalam kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah berpedoman dengan Renstra PD dan RKPD.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf DPMPTSP Kota Batam secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Pada prinsipnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam telah berupaya dengan maksimal menyusun Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, agar pelaksanaan pembangunan daerah Kota Batam dapat bermanfaat untuk merealisasikan sasaran dan program kegiatan DPMPTSP serta bagi kemajuan kota dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kota Batam, maka akan dilakukan analisis dan identifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menjadi referensi dalam Renja 2023.

Pada akhirnya, Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2023 merupakan pedoman dan pengontrol serta sangat membantu Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Batam untuk memastikan arah kinerja perangkat daerah sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah Pemerintah Kota Batam.

Batam, 22 Juli 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM



FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19680412 198909 1 002